

FILSAFAT ANALITIS MENURUT LUDWIG WITTGENSTEIN: RELEVANSINYA BAGI PENGEMBANGAN PRAGMATIK*

*Kaelan***

ABSTRAK

Filsafat Wittgenstein dibagi menjadi dua periode, periode pertama berjudul *Tractatus Logico-Philosophicus* (1922), yang intinya tentang teori gambar (*picture theory*) dan mengungkapkan tentang logika bahasa. Menurut Wittgenstein, hakikat bahasa merupakan gambaran logis dunia empiris, yang tersusun atas proposisi-proposisi dan menggambarkan 'keberadaan suatu peristiwa' (*state of affairs*).

Filsafat Wittgenstein periode kedua adalah *Philosophical Investigations* (1953), yang memuat tentang 'permainan bahasa' (*language games*). Menurut Wittgenstein, bahasa digunakan manusia dalam berbagai bidang kehidupan, dan dalam setiap kehidupan manusia itu memiliki aturan penggunaan masing-masing.

Filsafat Wittgenstein tersebut relevan bagi pengembangan dasar filosofis pragmatik. Prinsip dalam permainan bahasa tersebut relevan bagi pengembangan dasar filosofis pragmatik, baik menyangkut aspek ontologis, epistemologis, maupun aksiologis.

PENGANTAR

Perkembangan filsafat analitis dilatarbelakangi oleh adanya kekacauan bahasa filsafat. Banyak teori serta konsep filsafat dipaparkan dengan bahasa yang membingungkan, bahkan semakin jauh dari bahasa sehari-hari (Bakker, 1984:122). Dalam mengatasi kekacauan bahasa filsafat tersebut, tampilah tokoh yang pertama kali meletakkan dasar-dasar filsafat analitis, yaitu G.E. Moore, yang mengembangkan tradisi analitika bahasa sebagai reaksi terhadap aliran idealisme yang berkembang di Inggris saat itu, melalui karyanya *Principia Ethica* (Moore, 1954).

Salah satu tokoh filsafat analitis yang memiliki konsep yang lengkap dan inovatif adalah Ludwig Wittgenstein, dengan dua buah karya besarnya *Tractatus Logico-Philosophicus* dan *Philosophical Investigations*. Seluruh filsafat menurut Wittgenstein hanya merupakan suatu metode, yaitu *critique of language* (Bakker, 1984:125). Dengan metode itu, akan semakin terbuka kemungkinan untuk melakukan kritik terhadap pemikiran filsafat dan akan semakin dapat diketahui kejelasan konsep-konsep yang bermakna atau tidak bermakna (Charlesworth, 1959:111; Bakker, 1984:123, 124).

* Disertasi dalam bidang filsafat bahasa yang dipertahankan di depan dewan penguji tanggal 20 Juni 2003 dengan Prof. Dr. Endang Daruni Asdi sebagai Promotor, Prof. Dr. R. Soejadi, S.H. sebagai Ko-Promotor I, dan Prof. Dr. I. Dewa Putu Wijana, S.U., M.A. sebagai Ko-Promotor II.

** Staf Pengajar Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Kekacauan dan kekurangjelasan penggunaan bahasa dalam filsafat itu sampai saat ini masih dirasakan. Berdasarkan pengamatan sementara, filsafat dipandang sebagai ilmu yang sulit, membingungkan, dan kurang jelas makna yang diungkapkannya, sehingga banyak orang mengalami kesulitan mempelajari filsafat. Kekurangjelasan pengungkapan konsep filsafat tersebut disebabkan oleh kekacauan penggunaan ungkapan bahasa sehingga jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, dimungkinkan ilmu filsafat akan tersingkir dari khasanah kajian ilmiah. Melalui karyanya yang pertama, Wittgenstein mengajukan konsep pemikiran tentang bahasa ideal yang merupakan bahasa yang memenuhi formulasi logis, yang dijelaskan sebagai suatu gambaran realitas dunia empiris (Nuchelmans dalam Bakker 1984:129). Dalam karya kedua, Wittgenstein mengajukan konsep 'tata permainan bahasa' (*language games*) yang digunakan dalam berbagai macam konteks kehidupan manusia. Sejak perkembangan ilmu bahasa modern yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure dengan bukunya *Course in Generale Linguistics* (1916), kajian tentang hakikat bahasa lebih menekankan aspek struktur yang terlepas dari konteks kehidupan manusia sebagai penutur bahasa. Ilmu bahasa dalam dua dasawarsa yang silam tidak memberikan perhatian terhadap aspek pragmatis bahasa dalam kehidupan manusia (Wijana, 1996:3). Oleh karena itu, dewasa ini berkembanglah kajian pragmatik bahasa, yaitu kajian bahasa yang menekankan pada objek material bahasa yang digunakan dalam kehidupan manusia. Berdasarkan perkembangannya, kajian pragmatik diilhami oleh pemikiran filsafat bahasa, terutama para tokoh filsafat analitis yang mengembangkan tradisi Wittgenstein. Berdasarkan permasalahan tersebut, konsep filsafat analitis menurut Wittgenstein penting untuk diteliti, kemudian secara heuristik dikembangkan relevansinya bagi pengembangan filsafat bahasa dan dasar filosofis pragmatik.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah hakikat realitas bahasa merupakan suatu gambaran realitas dunia dan bagaimana konsekuensinya terhadap struktur bahasa, batas-batas bahasa, dan ungkapan yang bermakna?
2. Bagaimanakah hubungan ungkapan bahasa dengan pikiran manusia yang tertuang dalam logika bahasa serta pengaruhnya terhadap struktur bahasa?
3. Bagaimanakah hakikat kedudukan analitika bahasa sebagai metode dalam filsafat dan bagaimana konsekuensinya terhadap penggunaan bahasa dalam filsafat?
4. Bagaimanakah hakikat nilai makna bahasa serta peranannya dalam kehidupan manusia. Bagaimanakah arti dan aturan penggunaan bahasa dalam berbagai aspek kehidupan manusia?
5. Bagaimanakah relevansi filsafat analitis Wittgenstein terhadap pengembangan aksiologi bahasa dalam filsafat bahasa?
6. Bagaimanakah relevansi filsafat analitis Wittgenstein terhadap pengembangan dasar filosofis pragmatik?

Menurut Koren, dalam bukunya *Research in Philosophy*, penelitian ini termasuk jenis penelitian *historical studies* (Koren, 1966: 151), yang memfokuskan pada pemikiran seorang tokoh filsafat analitis tentang makna bahasa. Namun, penelitian kemudian dilanjutkan dengan *critique of the sciences* (Koren, 1966:151). Artinya, implikasi pemikiran filosofis tersebut memiliki kontribusi terhadap pengembangan dalam bidang ilmu bahasa.

Berdasarkan tipologi penelitian tersebut, metode yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Metode analisis, yang digunakan untuk mendeskripsikan, membahas, dan menjelaskan secara objektif konsep-konsep Wittgenstein berdasarkan ciri-ciri, kategori, serta kekhususannya.
2. Metode kesinambungan historis, yaitu untuk mengungkap pemikiran Wittgenstein sepanjang sejarah (Bakker dan Zubair, 1990:47), baik menyangkut latar belakang munculnya pemikiran Wittgenstein, aliran filsafat yang mempengaruhinya, maupun tahapan pemikirannya.

3. Metode interpretasi, yaitu untuk mengungkap makna dan nilai yang terkandung dalam konsep karena adanya dimensi waktu dan penggunaan bahasa sebagai ekspresi manusiawi. Metode ini tidak dapat dipisahkan dengan metode hermeneutika. Dengan demikian, pemikiran Wittgenstein dapat dipahami sesuai dengan pemikiran masa kini (Daruni Asdi, 1997:14).
4. Metode komparasi, yaitu langkah metodis dalam penelitian filsafat untuk membandingkan pemikiran Wittgenstein dengan pemikiran filsafat lainnya agar diperoleh pemahaman pemikiran Wittgenstein secara utuh.
5. Metode sintesis diterapkan untuk mendapatkan pengetahuan yang lengkap dan sistematis, yaitu dengan cara menyatukan konsep-konsep yang memiliki ciri-ciri serta kategori yang sama. Sintesis dilakukan berdasarkan suatu penalaran induktif aposteriori (Wibisono, 1982:11).
6. Metode heuristika, yaitu metode untuk menemukan suatu jalan baru dalam suatu ilmu pengetahuan. Melalui metode ini prinsip-prinsip pemikiran Wittgenstein dapat dikembangkan lebih lanjut relevansinya bagi filsafat bahasa dan dasar filosofis pragmatik.

Filsafat analitis sebagai objek material penelitian ini didasarkan pada teori G.E. Moore, yaitu suatu pemikiran baru yang melakukan analisis bahasa untuk mencari makna suatu ungkapan filsafat (Charlesworth, 1959:12). Analisis pengertian dilakukan dengan bertolak dari *definiendum* suatu ungkapan yang harus ditentukan batasannya, diuraikan menjadi *definiens*, yaitu batasan yang diperoleh. Penguraian lebih lanjut bertolak dari *analysandum*, yaitu konsep yang dianalisis, yang diuraikan menjadi *analysans*, yaitu uraian yang lebih jelas yang setara secara logis (Heraty, 1984:73).

Teori tentang filsafat analitis tersebut digunakan sebagai landasan dalam penelitian *Filsafat Analitis Wittgenstein*. Dalam pembahasannya, penelitian juga mendasarkan pada teori analisis yang mendasarkan

pada formulasi logika dan analisis yang mendasarkan pada bahasa sehari-hari. Hal ini mengingat tipologi karya filsafat Wittgenstein periode pertama mendasarkan pada logika bahasa dan kedua mendasarkan pada tata permainan bahasa sehari-hari.

Dalam hubungannya dengan objek material berupa ungkapan bahasa, Reichling menjelaskan bahwa bahasa memiliki unsur struktur yang bersifat empiris dan makna yang bersifat abstrak (Reichling, 1971:15), sedangkan hubungan dengan ilmu bahasa beserta pengembangannya didasarkan pada landasan teori ilmiah filosofis, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis (Suriasumantri, 1985:33).

PEMIKIRAN FILSAFAT WITTGENSTEIN

Pemikiran filsafat analitis Wittgenstein merupakan karya filsafat yang inovatif, yang dipengaruhi oleh konsep G.E. Moore, Bertrand Russell, dan Gottlob Frege. Karya Filsafat Wittgenstein dibagi atas dua periode, periode pertama *Tractatus Logico-Philosophicus* (1922) dan periode kedua *Philosophical Investigations* (1953). Kedua karya filsafat tersebut memiliki perbedaan substansial, terutama berkaitan dengan objek materialnya, tetapi diuraikan dalam suatu pemikiran yang sistematis.

Tractatus Logico-Philosophicus merupakan suatu karya filsafat yang singkat dan padat, serta disajikan dalam suatu deskripsi yang unik, yaitu dengan sistem notasi angka dengan menunjukkan prioritas logis dari proposisi-proposisinya. Inti filsafat *Tractatus* adalah *picture theory* yang menguraikan logika bahasa. Menurut Wittgenstein hakikat bahasa merupakan gambaran logis realitas dunia (Wittgenstein, 1961:67). Hakikat dunia merupakan keseluruhan fakta-fakta dan bukannya benda-benda (Wittgenstein, 1961:31), dan dunia terbagi menjadi fakta-fakta (Wittgenstein, 1961:31). Adapun fakta merupakan *states of affairs*, yaitu suatu keberadaan peristiwa.

Oleh karena itu, satuan bahasa yang menggambarkan dunia tersebut merupakan suatu proposisi-proposisi. Proposisi-proposisi itu bersifat kompleks dan tidak terbatas,

yang tersusun atas proposisi yang paling kecil yang disebut proposisi elementer atau proposisi atomis. Proposisi atomis menggambarkan satu fakta atomis (Poerwowidagdo, 1972:21). Proposisi elementer tersusun atas "nama-nama" yang merupakan unsur satuan logis sehingga nama akan memiliki makna dalam hubungannya dengan proposisi. Totalitas dari proposisi adalah bahasa yang menggambarkan realitas dunia. Gambaran tersebut merupakan gambaran logis dan bentuk *pictorial* dari realitas yang diwakilinya (Ayer, 1986:17). Kesesuaian antara proposisi dengan realitas tersebut tidak hanya menyangkut hubungan *pictorial* saja, tetapi juga menyangkut situasinya (Pitcher, 1964:77).

Sebuah gambaran logis tentang kenyataan merupakan sebuah pikiran dan di dalam sebuah proposisi sebuah pikiran mendapatkan sebuah ungkapan yang dapat diamati dengan indra (Wittgenstein, 1961:3). Hal ini mengandung makna bahwa sebuah proposisi itu menggambarkan sebuah fakta realitas dunia empiris. Konsekuensinya proposisi yang tidak menggambarkan realitas dunia empiris adalah proposisi yang tidak bermakna karena tidak mengungkapkan apa-apa.

Berdasarkan teori gambar tersebut, Wittgenstein berkeyakinan bahwa ungkapan metafisis itu tidak mengungkapkan realitas fakta sehingga tidak bermakna. Dalam hubungannya dengan ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan, estetika, dan etika, Wittgenstein menyebutnya bersifat "mistis".

Pemikiran Wittgenstein periode pertama ini dengan kuat mempengaruhi paham positivisme logis, suatu kelompok ilmuwan positif yang berpusat di Wina. Teori gambar dan logika bahasa digunakan sebagai dasar prinsip verifikasi dalam ilmu pengetahuan yang sampai saat ini masih besar pengaruhnya di seluruh dunia. Dalam hubungan dengan metafisika, positivisme logis bersikap lebih radikal dibandingkan Wittgenstein, yaitu ingin menghilangkan metafisika.

Pemikiran Wittgenstein periode kedua, *Philosophical Investigations*, tidak mendasarkan pada logika bahasa, tetapi pada bahasa biasa yang dipakai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jika pada periode pertama

Wittgenstein mendasarkan pemikirannya pada satu bahasa ideal yang memenuhi syarat logika, pemikiran periode kedua justru mendasarkan pada bahasa biasa yang bersifat beraneka ragam. Dalam pemikiran kedua, Wittgenstein mengakui kelemahan konsep pertamanya dan melakukan kritik, tetapi ia meletakkannya pada formulasi pemikiran yang sistematis.

Inti pemikiran Wittgenstein periode kedua adalah 'tata permainan bahasa' (*language games*). Hakikat bahasa adalah penggunaannya dalam berbagai macam konteks kehidupan manusia. Oleh karena itu, terdapat banyak permainan bahasa yang sifatnya dinamis, tidak terbatas sesuai dengan konteks kehidupan manusia. Setiap konteks kehidupan manusia menggunakan satu bahasa tertentu, dengan menggunakan aturan penggunaan yang khas dan tidak sama dengan konteks penggunaan lainnya. Berdasarkan macamnya, terdapat banyak penggunaan bahasa yang masing-masing memiliki aturan sendiri-sendiri dan hal itu merupakan suatu nilai. Misalnya, penggunaan bahasa dalam memberikan perintah dan mematuhi, melaporkan suatu kejadian, berspekulasi mengenai suatu peristiwa, menyusun cerita dan membahasnya, bermain akting, membuat lelucon, berterima kasih, berdoa, menguji suatu hipotesis dan penggunaan bahasa lainnya (Wittgenstein, 1983:23).

Oleh karena itu, Wittgenstein berkesimpulan bahwa makna sebuah kata adalah penggunaannya dalam kalimat, makna sebuah kalimat adalah penggunaannya dalam bahasa, dan makna bahasa adalah penggunaannya dalam berbagai konteks kehidupan manusia. Dalam hubungan ini konteks penggunaan logika bahasa sebagaimana terdapat dalam *Tractatus* merupakan satu macam permainan bahasa tersendiri. Dalam pemikirannya yang kedua ini, Wittgenstein tidak lagi mendasarkan pada bahasa ideal dan logis, tetapi mengembangkan pemikiran tentang pluralitas bahasa dalam kehidupan manusia

Pemikiran filsafat Wittgenstein periode kedua ini berpengaruh terhadap muncul-

nya aliran filsafat bahasa biasa (*Ordinary Language Philosophy*) dan postmodernisme. Aliran filsafat bahasa biasa ini berkembang di Eropa terutama di Inggris dan Amerika, serta memiliki pemikiran filsafat yang beraneka ragam. Berdasarkan sejarah perkembangan linguistik pragmatik, pemikiran filsafat bahasa biasa inilah yang merupakan inspirasi dikembangkannya pragmatik.

Filsafat analitis Wittgenstein tersebut relevan bagi pengembangan filsafat bahasa. Secara ontologis dalam hakikat bahasa terkandung nilai sehingga relevan jika dikembangkan "aksiologi bahasa", yang mendeskripsikan nilai bahasa dalam berbagai macam konteks kehidupan manusia. Aspek lain yang relevan untuk dikembangkan adalah 'Teologi gramatikal', yaitu salah satu bidang kajian bahasa pada penggunaannya dalam kehidupan religius.

Pemikiran Wittgenstein tersebut secara heuristik relevan bagi pengembangan dasar filosofis pragmatik yang meliputi aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Bahasa sebagai objek material filsafat dan ilmu pengetahuan secara objektif memiliki nilai, yang terkandung dalam aturan penggunaan bahasa dalam berbagai konteks kehidupan manusia. Perspektif nilai yang terkandung dalam bahasa itulah yang secara filosofis merupakan sumber kajian pragmatik sehingga selanjutnya dapat dikembangkan sebagai suatu bidang kajian empiris. Hal itu menunjukkan bahwa kajian bahasa bersifat 'ideografik', yaitu mendeskripsikan suatu objek dan bukannya bersifat nomotetik, yaitu mencari hukum-hukum yang bersifat alamiah dan tetap.

RELEVANSI FILSAFAT WITTGENSTEIN TERHADAP PENGEMBANGAN PRAGMATIK

Pemikiran filsafat Wittgenstein periode kedua tentang *Philosophical Investigations*, yang mengembangkan teori *language games* merupakan sumber teori bagi perkembangan filsafat berikutnya yang populer dikenal dengan filsafat bahasa biasa. Bahasa tidak hanya dikaji dari aspek struktural formal belaka, tetapi juga berdasarkan fungsi hakiki-

nya, yaitu fungsi penggunaannya dalam hidup manusia. Setelah pemikiran Wittgenstein periode kedua tersebut kemudian bermunculan filsuf-filsuf filsafat bahasa biasa, seperti Gilbert Ryle, J.L. Austin, P.F. Strawson, dan John Wisdom di Inggris, kemudian berkembang juga ke Amerika Serikat dengan tokoh-tokohnya, antara lain Max Black, John Searle, H.P. Grice, Norman Malcolm, dan W.P. Alston (Poerwowidagdo, 1972:34). Tokoh pragmatik Inggris yang juga seorang filsuf bahasa menegaskan bahwa linguistik berkembang ke arah suatu bidang yang belum dikaji oleh kalangan linguist, yaitu disiplin yang menyangkut bentuk, arti, dan konteks (Leech, 1983:2). Perkembangan yang cukup radikal terjadi di Amerika sebagai reaksi terhadap konsep sintaksisme model Chomsky, yang mengembangkan seluruh ilmu linguistik, termasuk fonologi dan semantik, dianggap relevan dalam kerangka sintaktik. Reaksi yang keras muncul dari George Lakoff dan Robert Ross yang menegaskan bahwa kajian sintaksis tidak dapat dipisahkan dengan pemakaian bahasa (Leech, 1983:2; Purwo, 1990:10; dan Wijana, 1996:4). Perkembangan pragmatik menemukan bentuknya tatkala John Searle mengembangkan *Speech Act* (1969) sehingga bidang ini merupakan suatu bidang baru dalam bidang kajian bahasa dalam hubungannya dengan penggunaannya dalam komunikasi kehidupan manusia.

Ketika pendahulu linguistik, seperti Ross dan Lakoff, menancapkan klaim dalam pragmatik pada akhir tahun 1960-an, mereka menemukan adanya suatu persilangan yang relevan dari ahli filsafat bahasa yang sejak lama telah mengembangkan aspek penggunaan bahasa dalam kehidupan manusia. Kenyataan pengaruh ini diakui oleh Leech bahwa inspirasi perkembangan pragmatik telah dirintis oleh ahli filsafat bahasa, seperti Austin (1962), Searl (1969) dan Grice (1975) (Leech, 1983:2). Sesuatu yang dikembangkan oleh para ahli filsafat tersebut merupakan suatu lahan yang sangat luas bagi pembahasan semantik bagi pengembangan linguistik terutama pragmatik. Linguistik yang selama ini diwarnai oleh kajian yang bersifat struktural dan sintaktik menemukan suatu

wilayah baru yang sangat luas yang merupakan bidang kajian makna bahasa dalam hubungannya dengan pragmatik. Wilayah baru tersebut dalam kenyataannya bukanlah ditemukan oleh para ahli linguistik, melainkan oleh para ahli filsafat bahasa. Refleksi mereka pada fenomena bahasa memiliki dampak signifikan dan permanen pada perkembangan linguistik modern secara khusus pragmatik (Mey, 1993:22).

Pada awalnya ahli filsafat bahasa menyibukkan diri dengan masalah bahasa dan mengkonsentrasikan diri pada hubungan antara ungkapan bahasa yang didefinisikan secara logika dengan kalimat dalam bahasa alami. Para tokoh yang mengembangkan pemikiran, ini antara lain Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap, serta para tokoh positivisme logis. Para tokoh ini berpendirian bahwa penggunaan bahasa yang benar senantiasa dikaitkan dengan justifikasi kebenaran logika.

Pemikiran ini menjadi pudar setelah munculnya pemikiran filsafat Wittgenstein, philosophical investigations, yang mengembangkan paradigma yang berlawanan dengan bahasa ideal berdasarkan logika. Pada pemikirannya yang kedua ini, Wittgenstein justru mendasarkan objek material filsafatnya pada bahasa sehari-hari. Ia melakukan pengamatan pada bahasa sehari-hari yang digunakan oleh manusia. Sejak pemikiran ini, berkembang paham filsafat yang mendasarkan pada objek material bahasa sehari-hari sehingga populer disebut sebagai filsafat bahasa biasa. Seorang tokoh yang menentang secara keras terhadap bahasa dalam hubungannya dengan logika adalah J.L. Austin. Ia mengembangkan filsafat bahasa biasa yang dipelopori oleh Wittgenstein. Karya yang sangat populer dari Austin adalah *How to Do Things with Words* (Mey, 1993:23). Selain sebagai tokoh filsafat bahasa biasa, ia juga berjasa meletakkan dasar-dasar pemikiran filosofis pada pengembangan linguistik pragmatik (Mey, 1993:22), bahkan banyak buah pemikirannya diangkat dalam studi linguistik pragmatik, antara lain macam-macam ungkapan tuturan bahasa seperti tuturan konstatif dan tuturan perfor-

matif, kemudian tindak tuturan lokusi, ilokusi, dan perlokusi (Wijana, 1996:17-19, 29).

Aspek Ontologis

Perkembangan kajian linguistik pragmatik merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dielakkan oleh para pakar linguistik. Konsep struktural linguistik modern yang bersumber pada teori linguistik Saussure dengan konsep *langue*, *langage*, dan *parole* tidak mampu mengungkapkan makna hakikat bahasa bagi kehidupan manusia (Saussure, 1916). Kalangan linguis struktural mengembangkan konsep ontologis, bahwa hakikat bahasa sebagai kajian ilmiah merupakan suatu entitas yang terlepas dengan manusia. Menurut kalangan strukturalisme, linguistik mengkaji bahasa sebagai bahasa, yang merupakan suatu gejala empiris dan dapat diuji secara empiris pula. Secara ontologis kalangan strukturalis memahami bahasa sebagai suatu entitas alamiah yang terlepas dari manusia, seperti gejala-gejala alam lainnya. Jika demikian halnya, kalangan strukturalis gagal mendeskripsikan bahasa secara kausalitas. Tanpa pendekatan kausalitas, bahasa hanya merupakan letupan bunyi yang tidak memiliki makna, baik internal maupun eksternal.

Kehadiran bidang pragmatik dalam linguistik menjanjikan dimensi baru dalam bahasa, yaitu dalam hubungannya dengan penggunaan dalam kehidupan manusia. Menurut Leech, pragmatik tidak hanya berkaitan dengan data fisik bahasa, tetapi juga berkaitan dengan bentuk, makna, dan konteks (Leech, 1983:2). Sementara itu, Firth menekankan bahwa kajian bahasa harus senantiasa mempertimbangkan konteks, situasi yang meliputi partisipasi, tindakan partisipasi baik tindak verbal maupun nonverbal, ciri-ciri situasi lain yang relevan dengan hal yang sedang berlangsung dan dampak tindakan tutur yang diwujudkan dengan bentuk-bentuk perubahan yang timbul akibat tindakan partisipan. Dalam hubungan ini, Haliday memandang bahwa studi bahasa adalah sistem makna yang membentuk budaya manusia dan berkaitan dengan struktur sosial (Haliday & Hasan dalam Wijana, 1996:5).

Secara ontologis Wittgenstein meletakkan dasar-dasar pragmatik yang lebih kompleks karena bahasa tidak hanya dipahami dalam hubungannya dengan tindak tutur, konteks, situasi serta akibat dari tindak tutur, tetapi jauh lebih luas. Konsep *language games* memberikan dasar filosofis bahwa hakikat makna bahasa adalah penggunaannya dalam kehidupan manusia yang bersifat kompleks, spontan, tidak terbatas, serta beragam (Wittgenstein, 1983:23). Selanjutnya Wittgenstein menjelaskan bahwa dalam berbagai bidang kehidupan, manusia senantiasa menggunakan suatu permainan bahasa tertentu dan beragam sehingga antara yang satu dan lainnya memiliki perbedaan. Wittgenstein memberikan beberapa contoh permainan bahasa dalam kehidupan manusia, antara lain memberi perintah dan mematuhiinya, menjabarkan penampakan suatu objek atau memberikan suatu pengukuran, melaporkan suatu kejadian, berspekulasi mengenai suatu peristiwa, membentuk dan menguji suatu hipotesis, menyusun cerita dan membacanya, bermain akting, menyanyi, menebak teka-teki, membuat lelucon dan menceritakannya, memecahkan soal matematika, bertanya, berterima kasih, memaki, menyambut, dan berdoa (Wittgenstein, 1983:23). Secara ontologis hakikat permainan bahasa menunjukkan hakikat kehidupan manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, alam serta terhadap Tuhan. Berdasarkan sifat hakikat permainan bahasa tersebut dapat disimpulkan bahwa Wittgenstein mengembangkan prinsip pluralitas bahasa. Oleh karena itu, kajian bahasa tidak lagi berupaya untuk mencari hukum-hukum, tetapi mendeskripsikan permainan bahasa dalam kehidupan manusia. Hal inilah yang merupakan fungsi hakiki bahasa bagi manusia.

Berdasarkan deskripsi tersebut, secara ontologis hakikat keberadaan bahasa tidak dapat hanya dijelaskan secara empiris parsial ataupun secara behavioristik, tetapi senantiasa memproyeksikan kehidupan manusia sebab terdapat banyak dimensi bahasa yang tidak dapat dijelaskan melalui suatu perspektif behavioristik.

Aspek Epistemologis

Pendekatan kalangan strukturalis menekankan pada aspek empiris serta struktur formal bahasa sebagai objek kajian. Bahasa sebagai objek kajian adalah eksistensi bahasa yang tidak memiliki hubungan kausalitas dengan hakikat manusia dan kehidupannya. Bahasa sebagai objek material memiliki ciri empiris dan dapat diverifikasi secara empiris pula. Secara tidak langsung pendekatan epistemologis kalangan strukturalis bersifat positivistik. Menurut kalangan strukturalis, bahasa sebagai suatu sumber pengetahuan, sepadan dengan gejala-gejala alam lainnya, sehingga dapat diterapkan verifikasi sebagaimana dilakukan pada ilmu-ilmu alam, menurut istilah positivisme logis adalah prinsip fisikalisme. Model epistemologi strukturalisme tampak adanya ciri-ciri realistik, empiris, dan cenderung membangun suatu teori. Pendekatan epistemologis semacam ini, sebagaimana dikembangkan oleh Reichenbach (1938), menekankan bahwa tugas ilmu pengetahuan pada hakikatnya membangun suatu teori ilmu yang bertolak dari *Lebenswelt*. Sementara itu, Toulmin (1953) menegaskan bahwa tugas ilmu pengetahuan adalah membangun sistem ide-ide tentang semesta sebagai suatu realitas, dan sistem tersebut menyajikan teknik-teknik yang bersifat 'ajeg' dalam memproses data dan diterima sesuai dengan *Weltanschauung*-nya. Oleh karena itu, tugas ilmu pengetahuan adalah membangun teori-teori yang terdiri atas hukum-hukum, hipotesis-hipotesis, serta ide-ide tentang semesta yang tertata secara hierarki. Menurut Toulmin, teori-teori bersifat instrumentalistik, teori hanyalah hukum-hukum untuk membuat suatu inferensi. Berdasarkan teori positivistik tersebut, sifat ilmu pengetahuan menjadi *nomothetik* (Muhajir, 1996:13-14).

Berkaitan dengan tinjauan epistemologis tersebut, linguistik struktural berupaya untuk mengembangkan teori-teori serta hukum-hukum sintaksis, morfologi, serta fonologi sebagai hasil kajian objek bahasa yang bersifat empiris. Jika demikian halnya, sebenarnya kajian ilmu bahasa tidak pernah menyentuh tataran semantik. Betapapun

kalangan strukturalis memberikan istilah semantik gramatikal, hal itu merupakan suatu pemerkosaan terhadap realitas bahasa yang bersifat ganda.

Dominasi dan pemaksaan ilmu oleh kalangan positivisme dan rasionalisme yang menekankan pada produk hukum-hukum serta teori-teori dan verifikasi atas objek empiris serta kajian ilmu yang bersifat parsial menimbulkan suatu reaksi yang keras dari berbagai tokoh ilmu pengetahuan khususnya bidang sosial humaniora. Reaksi tersebut datang dari mazhab Frankfurt, antara lain dari Max Horkheimer (1895-1973), Theodor W. Adorno (1903-1969), Herbert Marcuse (1898-1979), dan Jurgen Habermas (1929). Teori kritis tersebut menolak dengan tegas pandangan positivistik yang hanya mementingkan fakta-fakta empiris, prinsip verifikasi yang bertujuan memproduksi teori-teori serta hukum-hukum ilmu pengetahuan. Fakta-fakta tersebut sebagian merupakan suatu produk masyarakat tertentu yang tidak dapat diverifikasi serta difalsifikasi berdasarkan teori dari produk lainnya. Bagi teori kritis, tatanan masyarakat serta makna kehidupan tidak dapat diverifikasi ataupun difalsifikasi sebab tatanan masyarakat serta makna kehidupan tidak dapat ditentukan berdasarkan teori serta hukum dari tatanan serta makna kehidupan masyarakat lainnya (Budiyanto, 2002:43).

Perkembangan linguistik pragmatik yang memperhitungkan aspek penggunaan bahasa dalam kehidupan manusia merupakan langkah maju dan suatu revolusi paradigmatis dalam bidang linguistik. Namun demikian, secara epistemologis masih tampak adanya keterikatan terhadap linguistik struktural, terutama dalam hubungannya dengan epistemologi bahasa. Hal ini tampak dalam berbagai analisis pragmatik mendasarkan pada analisis kalimat, kemudian berkembang ke arah tindak tutur bahasa, sehingga memiliki ciri *behavioristik*.

Aspek struktural dan aspek tindak tutur bahasa memang tidak bisa dilepaskan dengan kajian pragmatik bahasa, tetapi dimensi bahasa menurut Wittgenstein jauh lebih luas dari itu. Bahasa pada hakikatnya menunjukkan suatu kehidupan manusia, yang masing-masing memiliki aturan tersen-

diri dan berbeda antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, fenomena bahasa yang menunjukkan kehidupan manusia ini sifatnya sangat beraneka ragam, bersifat spontan dan tidak terbatas (Wittgenstein, 1983:23). Berdasarkan pengertian itu, seharusnya dalam bidang pragmatik memiliki objek material kajian bahasa yang sangat luas dan bukan hanya terbatas pada analisis kalimat dan tindak tutur bahasa. Misalnya, sebagaimana diungkapkan Wittgenstein sebagai hasil dari suatu pengamatan, bahwa dalam suatu komunitas masyarakat tertentu, misalnya masyarakat pekerja bangunan, menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa yang barangkali secara linguistik dapat dikatakan tidak memenuhi syarat. Seorang yang mengungkapkan 'papan', 'balok', 'tiang' dan 'batu' misalnya dapat ditangkap oleh lawan bicaranya sebagai suatu makna tertentu, misalnya tiang dipasang di sisi kiri, papan diserut dan dipotong yang kesemuanya itu hanya dipahami aturannya pada komunitas tersebut.

Aspek lain dalam linguistik pragmatic adalah masih adanya kecenderungan mengembangkan aspek normatif seperti yang dilakukan oleh linguistik struktural, misalnya aturan dalam tindakan bahasa, macam-macam tindakan bahasa, norma sopan santun, validitas tuturan, prinsip kerja sama, prinsip kesopanan, serta parameter pragmatik. Jika cara kerja epistemologi linguistik pragmatik demikian, konsekuensinya kajian pragmatik kembali terjerumus pada ilmu yang bersifat *nomothetic*. Wittgenstein mengembangkan suatu paradigma yang jelas, bahwa dalam teori tata permainan bahasa tersebut setiap penggunaan bahasa dalam kehidupan manusia memiliki aturannya masing-masing yang sangat beragam serta tidak terbatas. Aturan itu sulit jika hanya ditentukan secara normatif, serta sulit ditentukan batas-batasnya secara tepat, tetapi manusia memahami bagaimana menggunakan bahasa dalam setiap aspek kehidupan yang sangat beraneka ragam tersebut (Wittgenstein, 1983: 23). Oleh karena itu, pemikiran Wittgenstein tersebut sangat relevan untuk pengembangan objek kajian linguistik pragmatik pada aspek kualitas bahasa yang digunakan manusia dalam kehidupannya.

Aspek Aksiologis

Hubungan ilmu pengetahuan dengan nilai merupakan suatu persoalan yang menimbulkan pandangan berbeda di kalangan ilmuwan dan filsuf. Ada aliran yang berpendapat bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya *value free*, 'bebas nilai', artinya tidak ada hubungan antara ilmu pengetahuan dengan nilai (Melsen, 1985:85). Aliran yang berpendapat demikian ini, antara lain paham positivisme logis. Ilmu pengetahuan harus bebas dari segala nilai di luar ilmu pengetahuan itu sendiri, misalnya emosi manusia, kepentingan serta kekuasaan. Berbeda dengan pandangan tersebut, paham fenomenologi termasuk ilmu-ilmu naturalistik dan humanistik berpendapat bahwa selama manusia memiliki kepentingan terhadap ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan itu bersifat terikat nilai, *value bound* (Muhadjir, 1996:117, 118). Menurut paham ini, pengenalan kita bersifat perspektif, bagaimana dan dari mana kita mengenal dan mempengaruhi apa yang kita kenal. Bagi paham ini, teori dan fakta ditentukan oleh nilai.

Bagi linguistik pragmatik, persoalan hubungan nilai dengan ilmu bahasa itu sendiri belum banyak dibahas, bahkan tidak dipersoalkan hubungan nilai dengan ilmu bahasa terutama pragmatik. Secara objektif sebenarnya persoalan nilai dalam kehidupan manusia dituangkan dalam ungkapan bahasa, bahkan dapat dikatakan bahwa esensi bahasa itu sendiri hakikatnya adalah nilai. Bertolak dari prinsip dasar itu, secara ontologis hakikat bahasa memiliki dua unsur pokok, yaitu struktur dan makna yang merupakan suatu nilai. Struktur bahasa lazimnya menyangkut wujud empiris sehingga dalam penelitian bahasa termasuk bidang pragmatik. Wujud empiris ini merupakan objek kajian, tetapi memuat unsur nilai yang merupakan makna bahasa.

Prinsip dasar yang dikembangkan Wittgenstein tentang hakikat bahasa, adalah suatu realitas yang memiliki dimensi empiris dan nonempiris yang berupa nilai. Ungkapan bahasa yang digunakan manusia dalam ber-

komunikasi dalam suatu tindak tutur secara empiris dapat ditangkap melalui indra pendengar. Ungkapan empiris tersebut memiliki dimensi makna, yaitu makna informasi yang terkandung dalam ungkapan bahasa itu. Menurut Wittgenstein, makna yang merupakan nilai yang terkandung dalam ungkapan bahasa terdapat dalam kehidupan manusia karena pada prinsipnya bahasa digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi mengungkapkan suatu makna yang merupakan suatu nilai kehidupan. Makna yang terkandung dalam kehidupan manusia bersifat tidak terbatas dan dalam setiap konteks kehidupan memiliki ciri khas serta aturan masing-masing. Aturan tersebut bukan merupakan norma yang baku, misalnya menyangkut aspek sintaksis atau morfologis, melainkan merupakan suatu nilai yang telah dipahami oleh manusia sebagai subjek penutur bahasa. Makna serta nilai yang terkandung dalam kehidupan manusia yang diungkapkan melalui bahasa bersifat tidak terbatas dan beraneka ragam (Wittgenstein, 1983:23). Untuk mengetahui hakikat makna yang terkandung dalam suatu ungkapan bahasa, kita harus memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan manusia dalam hubungannya dengan penggunaan ungkapan bahasa tersebut.

Suatu ungkapan bahasa dalam konteks pragmatik tidak memiliki korelasi logis dengan struktur gramatikal yang merupakan realitas empiris bahasa. Hal ini berdasarkan pada kandungan nilai yang ada dalam ungkapan bahasa dalam hubungannya dengan kehidupan manusia. Suatu ungkapan bahasa yang memiliki norma yang ekuivalen secara sintaksis belum tentu memiliki nilai yang ekuivalen secara pragmatik karena nilai yang merupakan esensi makna yang terkandung dalam kehidupan manusia belum tentu sama. Misalnya, dalam suatu ungkapan berikut.

- (1) Amin mempunyai anak kemudian menikah.
- (2) Amin menikah kemudian mempunyai anak.

Dua kalimat tersebut berdasarkan prinsip logika memiliki struktur yang ekuivalen. Kedua kalimat itu merupakan suatu proposisi logika p 'menikah' & q 'memiliki anak'. Kedua proposisi itu berdasarkan hukum logika memiliki nilai yang ekuivalen baik p & q, maupun q & p. Meskipun kedua kalimat tersebut memiliki syarat kebenaran yang sama secara logis, secara pragmatik kedua kalimat tersebut memiliki nilai dan makna yang berbeda (Levinson, 1983:35).

Dua kalimat tersebut secara sintaksis memiliki struktur yang sama, baik secara gramatikal, maupun berdasarkan fungsinya, yaitu subjek maupun predikatnya. Kalimat (1) maupun kalimat (2) masing-masing merupakan suatu kalimat luas, yang dihubungkan dengan kata penghubung 'kemudian'. Kalimat (1) tersusun atas kalimat berikut.

(1a) Amin mempunyai anak.

(1b) Amin menikah.

Kedua kalimat sederhana tersebut dihubungkan dengan melakukan suatu penghematan pada subjek (S) Amin, serta dihubungkan dengan kata penghubung 'kemudian', yang secara gramatikal memiliki makna perurutan (Rozaq, 1988:41). Kalimat (2), merupakan suatu kalimat luas yang tersusun atas dua kalimat sederhana.

(2a) Amin menikah.

(2b) Amin mempunyai anak.

Kedua kalimat tersebut digabungkan menjadi suatu kalimat luas dengan melakukan penghematan terhadap subjek (S) 'Amin', dan dihubungkan dengan kata penghubung 'kemudian', yang secara gramatikal memiliki hubungan perurutan (Razaq, 1988:42). Berdasarkan susunannya, secara gramatikal kedua kalimat tersebut memiliki struktur yang sama dan berdasarkan fungsinya juga memiliki susunan yang sama.

Dalam konteks pragmatik, ternyata kedua kalimat tersebut memiliki nilai yang tidak sama. Kalimat (1) dan kalimat (2) memiliki nilai yang tidak sama, baik nilai moral maupun nilai religius. Berdasarkan nilai moral, kalimat (1) itu berarti mengandung nilai tidak

susila. Adapun kalimat (2) merupakan suatu kalimat yang memiliki nilai susila. Berdasarkan nilai religius kalimat (1) itu tidak sesuai dengan ajaran agama, sedangkan kalimat (2) sesuai dengan ajaran agama.

Data bahasa yang bersifat empiris menyangkut tataran deskriptif dan secara ontologis data bahasa yang bersifat empiris tersebut tidak akan memiliki makna apa-apa tanpa adanya konteks nilai dalam hubungan penggunaan ungkapan bahasa dalam kehidupan manusia. Aspek nilai yang merupakan dimensi makna bahasa dan bersumber pada kehidupan manusia pada hakikatnya berada pada dua kutub, yaitu pemahaman dan pengetahuan manusia. Atas dasar keberadaan nilai di antara kedua kutub tersebut manusia harus menentukan berdasarkan rasa serta akal budi manusia (Budiyanto, 2002:95).

Hakikat bahasa dalam hubungannya dengan penggunaan dalam kehidupan manusia menampakkan suatu problema tentang pembenaran makna bahasa yang merupakan suatu nilai. Secara ontologis keberadaan bahasa disebabkan oleh kepentingan manusia untuk berkomunikasi. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat antara manusia dengan bahasa, yaitu manusia sebagai sebab dan bahasa sebagai akibat. Berdasarkan kenyataan ini, nilai yang melekat pada bahasa ditentukan oleh eksistensi manusia sebagai subjek.

Terdapat suatu konsep pemikiran tentang nilai dalam hubungannya dengan peranan manusia. Nilai dapat dipahami manusia melalui akal budi serta kesadarannya. Seseorang mampu berpikir tentang sesuatu, memiliki suatu imajinasi, serta mampu berkreaitivitas karena ia memiliki akal budi dan kesadaran. Bagi aliran subjektivisme, letak nilai berada pada tataran akal budi dan kesadaran manusia. Segala sesuatu bernilai karena ditentukan oleh akal budi dan kesadaran manusia. Berbeda dengan pandangan tersebut aliran objektivisme berpendapat bahwa nilai sebenarnya berada pada objek itu sendiri, terlepas dari penilaian akal budi dan kesadaran manusia (Budianto, 2002:96). Max Scheler tidak mendasarkan pada eksistensi subjek ataupun objek, tetapi penger-

tian nilai harus dipahami berdasarkan hakikat nilai itu sendiri (Driyarkara, 1978:142). Menurut Scheler nilai dibedakan atas: (1) nilai indrawi, (2) nilai vital, yang berkaitan dengan hidup manusia seperti kesehatan, kelelahan, kesakitan, dan (3) nilai spiritual yang meliputi nilai keindahan, keadilan, nilai kebenaran pengetahuan. Di antara ketiga nilai tersebut terdapat nilai yang tertinggi, yaitu kekudusan yang merupakan nilai religius yang memiliki sifat mutlak (Frondizi, 1963:138, 139; Driyarkara, 1978:145). Sejalan dengan pandangan Scheler tersebut, Notonagoro menambahkan nilai kesusilaan atau nilai moral pada nilai kerohanian (Darmodiharjo, 1995:43, 44).

Berbeda dengan penggolongan tersebut, Everet membedakan nilai menjadi delapan macam, yaitu (1) nilai ekonomis, yaitu nilai yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomis manusia, (2) nilai kejasmanian, yang berhubungan dengan aspek jasmani manusia, (3) nilai hiburan, yaitu nilai yang berkaitan dengan permainan manusia untuk memperkaya kehidupan, (4) nilai sosial, yaitu nilai yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam berkomunikasi dengan manusia lain, (5) nilai watak, yaitu nilai yang berhubungan dengan kepribadian manusia, (6) nilai estetis yang berkaitan dengan keindahan, (7) nilai intelektual, yaitu nilai yang berhubungan dengan aspek intelektual manusia, dan (8) nilai religius, yaitu nilai yang berhubungan dengan keagamaan (Darmodiharjo, 1996:228).

Untuk mendapatkan suatu kejelasan pengertian tentang makna bahasa yang sering juga disebut aspek semantik, perlu penjelasan yang didasarkan pada sistem epistemologisnya, baru kemudian ditentukan titik temunya. Dalam bidang linguistik, kajian semantik adalah 'makna internal linguistik' (*linguistic meaning*) atau 'makna semantik' (*semantic sense*), sementara yang dikaji bidang pragmatik adalah 'maksud penutur' (*speaker meaning*) atau *speaker sense* (Verhaar, 1996; Parker dalam Wijana, 1996:3), dan makna ini berkaitan dengan aspek 'eksternal'. Menurut Leech (1983), pragmatik sebagai cabang ilmu bahasa yang

mengkaji penggunaan bahasa berintegrasi dengan tata bahasa yang terdiri atas fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik melalui pragmatik, seperti terlihat dalam diagram berikut ini.

Fonologi
Morfologi
Sintaksis
Pragmatik
Semantik

(Wijana, 1996:3).

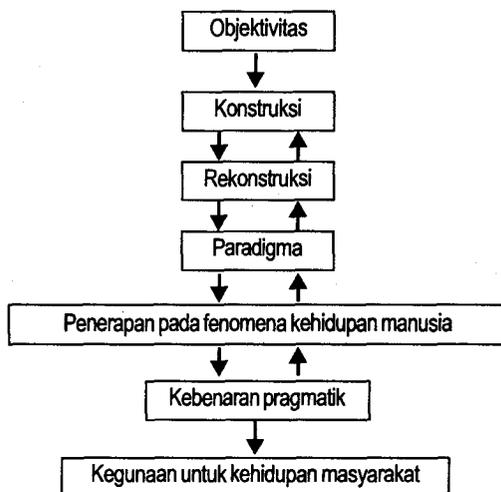
Berkaitan dengan makna bahasa, Wittgenstein memiliki pendapat yang berbeda dengan konsep Parker maupun Verhaar. Jika sistem epistemologi pragmatik demikian, akan menjurus ke arah behaviorisme. Menurut Wittgenstein makna bahasa bukan terdapat dalam bahasa atau penutur bahasa, melainkan terdapat dalam kehidupan manusia itu sendiri. Secara ontologis bahasa merupakan sarana komunikasi manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengkaji makna bahasa harus dilakukan pengamatan terhadap kehidupan manusia dalam hubungannya dengan aturan penggunaan bahasa tersebut. Setiap konteks penggunaan bahasa memiliki aturan masing-masing. Dalam aturan beserta penggunaannya dalam kehidupan manusia itulah akan ditemukan makna bahasa (Wittgenstein, 1983:90). Penggunaan ungkapan bahasa dalam suatu tindakan bahasa senantiasa memiliki nilai yang beraneka ragam (Allan, 1986:156, 157) sehingga untuk memahami makna eksternal ungkapan bahasa yang terdapat dalam kehidupan manusia harus melalui kajian nilai-nilai bahasa.

Berdasarkan analisis pengertian makna tersebut, peranan kajian nilai-nilai bahasa dalam kehidupan manusia menjadi sangat penting agar aspek semantik yang merupakan makna bahasa benar-benar dapat dipahami secara objektif. Paradigma pragmatik yang dikemukakan Parker dan Verhaar

memiliki kelemahan aksiologis maupun epistemologis. Paradigma kajian makna bidang pragmatik tersebut akan sangat terbatas pada aspek tingkah laku bahasa sehingga mengarah pada *behaviorisme*. Konsekuensinya bidang pragmatik akan mengalami kesulitan untuk mendeskripsikan secara objektif penggunaan ungkapan bahasa dalam kehidupan manusia yang sangat luas itu. Misalnya, ungkapan bahasa dalam konteks religius, mistik, metafisik serta estetis, tidak akan tersentuh oleh tingkah laku bahasa.

Menurut Guba (1990), objektivitas kebenaran suatu ilmu pengetahuan harus dapat dilihat pada kemampuan operasional ilmu pengetahuan itu serta kebenaran pragmatis ilmu pengetahuan itu dalam kehidupan manusia. Objektivitas kebenaran ilmu pengetahuan akan tampil, jika para ilmuwan mampu melihat kelemahan atau kekurangan paradigma yang telah ada dan diikuti dengan melakukan suatu rekonstruksi terhadap paradigma tersebut. Paradigma ilmu pengetahuan akan menjadi kokoh jika dapat diterapkan dalam suatu penelitian dan dapat mengantisipasi berbagai fenomena yang dihadapi dalam suatu penelitian. Ilmu pengetahuan harus dilihat sebagai sesuatu yang senantiasa berkembang, tidak statis, tidak absolut kebenarannya, serta senantiasa terbuka terhadap berbagai kemungkinan, terbuka untuk dikritik, bahkan dapat direkonstruksi sehingga dapat diperbarui. Objektivitas pada konstruksi paradigma ilmu pengetahuan dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu dilakukan suatu rekonstruksi paradigmatis terhadap bidang pragmatik. Objektivitas ilmiah akan tercapai manakala ontologi dan aksiologi makna bahasa itu tidak tumpang tindih dengan subjek penutur bahasa yaitu manusia, serta realitas empiris bahasa yang berupa aspek bunyi bahasa. Makna bahasa yang merupakan aspek semantik dikaji pada kehidupan manusia yang merupakan nilai sehingga bahasa dapat digunakan secara pragmatis dalam kehidupan manusia. Pada konstruksi seperti ini akan kita temukan susunan bidang kajian sebagai berikut.



(Guba, 1990:25, 26; Budianto, 2002:90).

1. Bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis merupakan konstruksi empiris bahasa, sehingga dapat dideskripsikan berdasarkan gejala empiris bahasa tersebut. Makna bahasa pada tataran ini terbatas pada makna empiris bahasa, yaitu makna gramatikal yang berkaitan dengan makna 'internal' bahasa, belum pada tingkatan makna 'eksternal' bahasa dalam kehidupan manusia.
2. Perlu dilakukan suatu rekonstruksi terhadap paradigma, yaitu berdasarkan paradigma penggunaan makna bahasa dalam kehidupan manusia. Berdasarkan paradigma ini, setelah dilakukan konstruksi empiris bahasa, kemudian dilakukan kajian semantik bahasa dengan urutan kajian nilai bahasa dalam kehidupan manusia. Setelah dilakukan kajian nilai-nilai bahasa dalam kehidupan manusia, barulah aspek makna bahasa dapat dipahami. Kajian nilai-nilai bahasa itu dapat pula diistilahkan dengan bidang *aksiologi bahasa*.
3. Kajian terakhir adalah tentang aspek pragmatik bahasa, yaitu penggunaan bahasa dalam kehidupan manusia. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa manusia dapat menggunakan suatu ungkapan bahasa, yaitu aspek pragmatik, jika ia telah mengetahui

aturan penggunaan bahasa, yaitu nilai serta makna bahasa yang digunakan dalam suatu komunikasi dalam masyarakat. Bahasa tidak mungkin digunakan manusia tanpa mengkomunikasikan makna yang terkandung di dalamnya. Makna tersebut bukanlah suatu norma-norma internal linguistis saja, melainkan nilai-nilai eksternal linguistis, yang terkandung dalam kehidupan manusia dan diungkapkan melalui bahasa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa filsafat Wittgenstein merupakan karya besar yang bersifat inovatif dan mampu mengubah orientasi perkembangan ilmu, baik di Eropa maupun di Amerika. Pemikiran Wittgenstein periode pertama, *Tractatus Logico-Philosophicus*, merupakan sintesis eklektis pemikiran filsafat analitis, empiristis, dan logis.

Menurut Wittgenstein, hakikat realitas bahasa adalah gambaran realitas dunia empiris. Oleh karena itu, struktur bahasa tersusun atas proposisi-proposisi, dan totalitas bahasa merupakan gambaran logis dunia. Kedudukan analitika bahasa dalam filsafat adalah sebagai metode ilmiah untuk mengungkapkan realitas fakta empiris. Hasil pemikiran Wittgenstein itu merupakan dasar epistemologis bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern di Wina, yang kemudian berkembang ke seluruh dunia.

Pada karyanya yang kedua, Wittgenstein mengembangkan *Philosophical Investigations*, yang mendasarkan pada bahasa sehari-hari yang bersifat beraneka ragam. Wittgenstein menekankan adanya bermacam-macam penggunaan bahasa dalam berbagai konteks kehidupan manusia yang setiap konteks penggunaan tersebut memiliki aturannya masing-masing. Hal ini diistilahkan dengan *language games*.

Prinsip dasar *language games* dalam sejarah perkembangan filsafat analitis merupakan sumber inspirasi paradigmatis bagi perkembangan pragmatik. Berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut, pemikiran Wittgenstein periode kedua tersebut relevan

bagi pengembangan dasar filosofis pragmatik, baik meliputi aspek ontologis, epistemologis, maupun aspek aksiologis. Bahasa sebagai objek kajian pragmatik memiliki nilai yang terkandung dalam aturan penggunaan bahasa dalam berbagai konteks kehidupan manusia. Perspektif nilai yang terkandung dalam bahasa itulah secara filosofis merupakan sumber kajian pragmatik, mengingat linguistik pragmatik tidak bersifat "nomotetik", yang hanya mencari hukum-hukum dan dalil-dalil, tetapi bersifat "ideografik", yaitu mendeskripsikan bahasa yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang sifatnya tidak terbatas dalam berbagai konteks kehidupan manusia.

Atas dasar kajian penelitian filosofis tersebut, bidang pragmatik memiliki peluang untuk mengembangkan dimensi baru dalam kajian bahasa dalam konteks penggunaannya dalam berbagai bidang kehidupan manusia, yang pada gilirannya dapat dilakukan penelitian empiris tentang penggunaan bahasa.

DAFTAR RUJUKAN

- Allan, Keith. 1986. *Linguistics Meaning*. Volume One. London and New York: Routledge & Kegan Paul.
- Ayer. 1956. *The Revolution in Philosophy*. London: Mac. Millan & Co.
- Bakker, A. 1984. *Metode-metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bakker, A. dan Achmad Charris Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budiyanto, Irmiyati M. 2002. *Realitas dan Objektivitas: Refleksi Kritis atas Cara Kerja Ilmiah*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Charlesworth, M.J. 1959. *Philosophy and Linguistics Analysis*. Pittsburgh: Duquesne University.
- Darmodiharjo, Darji. 1995. "Orientasi Singkat Pancasila". Dalam Darji Darmodiharjo, Nyoman Dekker, A.G. Pringgodigdo, M. Wardoyo, Kuntjoro Purbopranoto, & J.W. Sulandra. *Santiaji Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Asdi, Endang Daruni 1997. *Imperatif Kategoris dalam Filsafat Immanuel Kant*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Driyarkara, N. 1978. *Percikan Filsafat*. Jakarta: Pembangunan.
- Frondizi, Risieri. 1963. *What is Value?* New York: Open Court Publishing Company.
- Guba, Egon. G. 1990. *The Paradigm Dialog*. Sage Publications. California: Newbury Park.
- Haliday, H.P. & Raqaiya Hasan. 1985. *Language Context, and Text: of Language in Social Semiotic Perspective*. Melbourne: Deakin University.
- Heraty, Tuty. 1984. *Aku dalam Budaya*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Koren, Henry. J. 1966. *Research in Philosophy*. United States of America: Doquesne University.
- Leech, G.N. 1983. *Principles of Pragmatics*. New York: Longman.
- Levinson, Stephen. C. 1983. "The Essential Inadequacies of Speech Acts Models of Dialogue". In Herman Parret, Marina Sbisà and Jef Verschueren (ed.). *Possibilities and Limitations of Pragmatics*. Amsterdam/Philadelphia: Jhon Benyamins.
- Van Melsen, A.G.M. 1985. *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*. Jakarta: Gramedia.
- Mey, Jacob. L. 1993. *Pragmatics*. Oxford & Cambridge: Blackwell.
- Moore, George Edward. 1954. "Wittgenstein's Lectures in 1930-1933" in *Mind*. January. 1955. London.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Pitcher, George. 1964. *The Philosophy of Wittgenstein*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Poerwowidagdo, Yudowibowo. 1972. *An Inquiry into The Logical Relationship of Teaching and Learning Based on The Linguistic Analysis of The Concept of Knowing*. Submitted to the Graduate in the School of Education in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. University of Pittsburgh.
- Reichling, A. 1971. *Bahasa Hukum-hukum dan Hakikatnya*. Ende Flores: Nusa Indah.
- Razak, Abdul. 1988. *Kalimat Efektif*. Jakarta: Gramedia.
- de. Saussure, Ferdinand 1916. *Cours in General Linguistics*. (trans.) Wade Baskin. New York: The Philosophical Library Inc.
- Suriasumantri, Yuyun. 1985. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Verhaar, J.W.M. 1996. *Asas-asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siswomihardjo, Koento Wibisono. 1982. *Arti Perkembangan menurut Filsafat Positivisme August Comte*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wittgenstein, Ludwig. 1961. *Tractatus Logico-Philosophicus*. London: Routledge & Kegan Paul L.T.D.
- Wittgenstein, Ludwig. 1983. *Philosophical Investigations*. Translated by G.E.M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell.